

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Di Sumatera Tahun 2017-2021

Frisca Septiana Ulfa
Politeknik Negeri Sriwijaya

Nelly Masnila
Politeknik Negeri Sriwijaya

Yuli Antina Aryani
Politeknik Negeri Sriwijaya

Alamat: Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Barat Ilir I, Kota Palembang, Sumsel
friscaseptiana29@gmail.com

Abstract. *There are still many problems with regional autonomy, one of which is fraud and increasing cases of corruption. Fraud in organizations, whether public or private, is usually caused by weak government internal control systems. This research aims to analyze the factors that influence the weaknesses of the provincial government's internal control system in Sumatra in 2017-2021. The type and data used in this research is a quantitative method with secondary data. The results of this research state that the variables Special Allocation Funds, Government Complexity, Original Regional Income, and Capital Expenditures have a significant positive effect on the Weaknesses of the Provincial Government's Internal Control System in Sumatra in 2017-2021. Meanwhile, the Government Size variable has a significant negative effect on the Weaknesses of the Provincial Government's Internal Control System in Sumatra in 2017-2021.*

Keywords: *Weaknesses of the Government's Internal Control System, Special Allocation Funds, Government Complexity, Government Size, Local Revenue, Capital Expenditure.*

Abstrak. Masih terdapat banyak permasalahan otonomi daerah salah satunya kecurangan dan meningkatnya kasus korupsi (*fraud*). Kecurangan dalam organisasi baik sektor publik atau swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Sedangkan variabel Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021.

Kata kunci: Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal.

LATAR BELAKANG

Sejak adanya reformasi pada tahun 1998 yang disebabkan oleh tidak optimalnya sistem pemerintah terdahulu karena semakin meningkatnya kasus dari implementasi pemerintahan Orde Baru sehingga telah terjadi perubahan peraturan yang berlaku

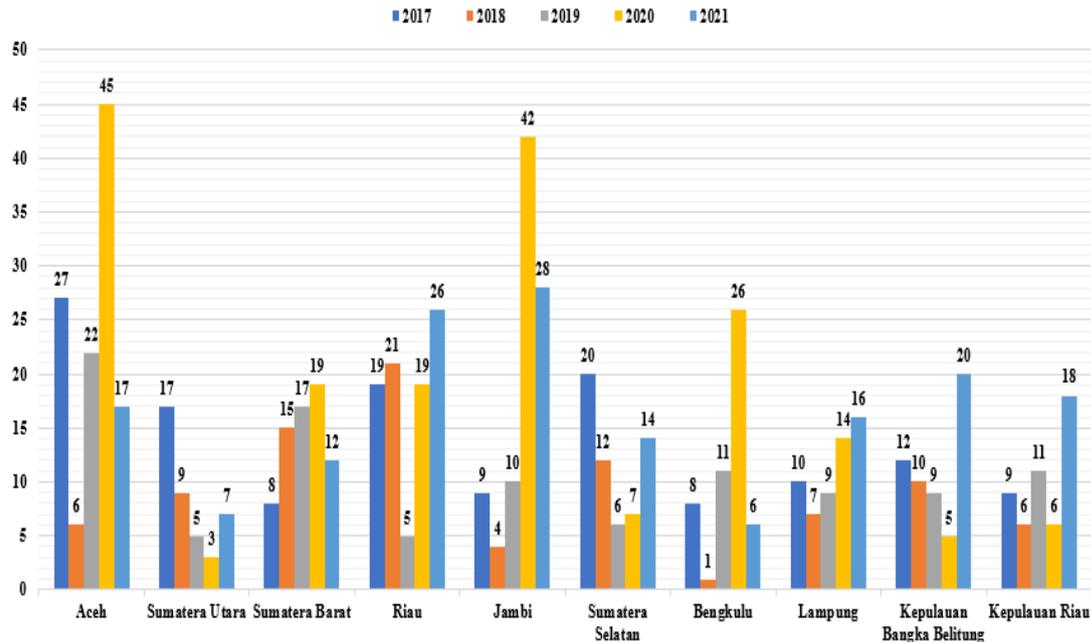
untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia hingga saat ini. Sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang memusatkan seluruh wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah pusat. Sekarang sistem pemerintahan tersebut telah berkembang menjadi desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Setiap tahun pemerintah daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari perluasan dan penambahan wilayah sehingga, dapat menyebabkan banyaknya pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dalam laporan keuangan yang tidak memadai dapat mengakibatkan terjadinya kasus korupsi (fraud). Kecurangan dalam organisasi baik sektor publik atau swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah. Lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah menjadi masalah utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu korupsi (fraud) dalam laporan keuangan pemerintah adalah diabaikannya sistem pengendalian internal pemerintah yang telah ada (Simanjuntak, 2016).

Wewenang sistem desentralisasi ditandai dengan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merancang daerah masing-masing. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di desain untuk mampu mendeteksi adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan permasalahan dalam aktivitas pengendalian, yang meliputi: (1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, (2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, (3) Kelemahan struktur pengendalian internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 542 LKPD tahun anggaran 2017-2021 mengungkapkan 27.988 temuan permasalahan, meliputi 8.974 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Kasus 13.087 (50%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar Rp10,67 Triliun, serta kasus kelemahan struktur

pengendalian internal sebesar 5.747 (17%). Kasus Sistem Pengendalian Internal Pemerintah banyak disebabkan oleh lemahnya APBD (<https://www.bpk.go.id>).



Sumber: <https://www.bpk.go.id> yang diolah

Gambar 1. Jumlah Kelemahan SPIP Provinsi di Sumatera Tahun 2017-2021

Menurut BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 kasus-kasus kelemahan SPIP pada umumnya terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tugas masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan prosedur stock opname yang kurang memadai. Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, seperti aset yang belum dicatat pada neraca atau nilai aset di neraca berbeda dengan catatan pendukungnya. (<https://www.bpk.go.id/ihps>).

Sistem pengendalian internal pemerintahan bertugas mengawasi penggunaan APBD pemerintah daerah. Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintahan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik dari faktor internal APBD maupun faktor eksternal APBD. Faktor internal APBD dapat berupa besaran anggaran APBD, besaran anggaran dalam pos-pos tertentu seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, belanja modal dan lain-lain, sedangkan faktor eksternal dapat berupa pertumbuhan ekonomi, kompleksitas pemerintah, dan ukuran pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengujian kembali terhadap penelitian Simanjuntak (2016) dengan obyek penelitian yang berbeda yaitu Provinsi di Sumatera menggunakan data penelitian yang berbeda yaitu tahun 2017-2021. Penelitian ini juga dilakukan kembali untuk melihat konsistensi hasil penelitian berdasarkan penelitian terdahulu dengan menggunakan data yang terkini. Peneliti memilih objek provinsi di Indonesia karena berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017-2021 di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa jumlah temuan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera masih relatif cukup banyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera.

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan. Agency theory adalah teori yang membahas hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Teori keagenan membahas tentang hubungan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan tertentu.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah daerah merupakan agen (agent) yang memperoleh mandat untuk mengelola anggaran dari rakyat sebagai pemilik anggaran (principal), yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dengan sebaik-baiknya bagi

kepentingan masyarakat. Agency theory memandang bahwa agent tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal (Rachmawati, 2016).

Dana Alokasi Khusus dapat berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern karena semakin besar DAK yang diterima suatu daerah tentunya akan semakin banyak anggaran yang dialokasikan dan semakin banyak mata anggaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus tersebut. Hal ini tentunya berimbas pada semakin besarnya beban pada sistem pengendalian internal pemerintah. Kompleksitas pemerintah adalah tingkatan diferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya (Melani, 2017).

Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar juga pendanaan yang digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul dari daerah tersebut juga semakin kompleks. Ukuran pemerintah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah (Melani, 2017). Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada PAD dapat menambah beban pada sistem pengendalian intern. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi mempunyai dampak semakin banyak pos-pos penerimaan dan mata anggaran dalam alokasi belanja daerah.

Belanja modal memiliki jumlah anggaran yang cukup besar dalam APBD sehingga memerlukan pengawasan intern yang intensif dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPK hingga tahun 2019 dapat diketahui permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) masih relatif cukup besar ditemukan dalam hasil pemeriksaan di pemerintah daerah di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
2. Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
5. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
6. DAK, KP, UP, PAD, dan BM berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif memiliki sifat yang induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka (skor, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang dinilai. Variabel independen yang digunakan terdiri dari 5 variabel yaitu, dana alokasi khusus (X1), kompleksitas pemerintah (X2), ukuran pemerintah (X3), pendapatan asli daerah (X4) dan belanja modal (X5). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Sumatera. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh atau disebut sensus sampling dimana saat semua anggota pada populasi dijadikan sebagai sampel (Alawiyah, 2020).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Seluruh data yang dikumpulkan dari catatan yang sudah ada karena data diperoleh melalui berbagai sumber buku, situs atau dokumen pemerintah. Untuk menggambarkan variabel independen dan dependen secara umum, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan untuk pengujian hipotesis peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Untuk mempermudah analisis, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang diajukan, data yang dikumpul diolah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 27.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dinilai dari rata-rata (mean), varian, maximum, minimum, standar *deviation*, *range*, *sum*, *skewness*, dan *kurtosis*. Nilai maksimum digunakan untuk menemukan kumpulan data

terbesar yang dapat dipertimbangkan dalam varian. Nilai minimum digunakan untuk menemukan jumlah terkecil dari rata-rata varian. Nilai minimum digunakan untuk menemukan jumlah terkecil dari rata-rata varian.

Data penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang diuji yaitu normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengestimasi nilai sebenarnya dapat diukur dengan *goodness of fit*. Secara statistik, penelitian ini dapat diukur dari nilai nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik dianggap signifikan secara statistik jika nilai uji statistik berada dalam rentang kritis (rentang di mana H_0 ditolak). Sebaliknya, jika nilai uji statistik berada dalam kisaran H_0 yang dapat diterima, maka dikatakan tidak signifikan.

Analisis regresi linier berganda bertujuan dari analisis regresi berganda ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil dari analisis regresi ini juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya (Rachmawati, 2016). Mengetahui apakah variabel dana alokasi khusus, kompleksitas pemerintah, ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi di Sumatera. Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{\text{KSPIP}} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y_{KSPIP} : Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

α : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien Regresi

X_1 : Dana Alokasi Khusus

X_2 : Kompleksitas Pemerintah

X_3 : Ukuran Pemerintah

X_4 : Pendapatan Asli Daerah

X_5 : Belanja Modal

e : Tingkat kesalahan (*standard error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Prosedur Penelitian

Prosedur pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi yang memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur, yaitu dana alokasi khusus, kompleksitas pemerintah (jumlah kecamatan), ukuran pemerintah (jumlah penduduk), pendapatan asli daerah dan belanja modal. Sampel penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Sumatera yang mempublikasikan Laporan Keuangannya pada tahun anggaran 2017-2021 dan telah diaudit oleh BPK RI, Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2017-2021 dan telah diaudit oleh BPK RI, Laporan jumlah penduduk dan jumlah kecamatan yang dipublikasikan oleh BPS RI. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Sumatera pada Tahun Anggaran 2017-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Prosedur pemilihan sampel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Total
1	Jumlah seluruh Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun Anggaran 2017-2021	10
2	Provinsi yang tidak termasuk kriteria sampel: <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi di Sumatera yang tidak memiliki laporan realisasi APBD pada Tahun Anggaran 2017-2021 dan telah di audit oleh BPK RI b. Provinsi yang tidak menyediakan data jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah yang diterbitkan oleh BPK RI c. Provinsi yang tidak menyediakan data jumlah penduduk dan jumlah kecamatan pada Tahun Anggaran 2017-2021 yang diterbitkan oleh BPS RI 	(0)
3	Jumlah data observasi yang diolah (10 x 5 Tahun)	50

Sumber: www.bpk.go.id dan www.bps.go.id data diolah 2023.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, dimulai sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Tempat penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi di Sumatera yang berjumlah 10 Provinsi. Metode *purposive sampling* digunakan dalam

penelitian ini untuk memilih sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan data yang terkumpul, seluruh pemerintah provinsi diseleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan penyeleksian tersebut, maka diperoleh 10 Pemerintah Provinsi yang dapat dijadikan sampel penelitian dengan 5 tahun periode pengamatan.

Tabel 1.2 Daftar Provinsi di Sumatera Tahun 2017-2021

No.	Sampel
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Sumatera Utara
3	Provinsi Sumatera Barat
4	Provinsi Riau
5	Provinsi Jambi
6	Provinsi Sumatera Selatan
7	Provinsi Bengkulu
8	Provinsi Lampung
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: www.bps.go.id yang diolah

c. Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1.3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAK (X1)	50	110698384.00	4449135664.00	1539045667.3400	1083450153.87513
KP (X2)	50	47.00	455.00	194.4400	111.99930
UK (X3)	50	1430865.00	14936148.00	5820234.7800	3848957.062
PAD (X4)	50	678913246.00	5991151366.00	2481779466.8000	1454255999
BM (X5)	50	161037469.00	3319367168.00	1115241181.9800	706851187.7
KSPIP (Y)	50	3.00	45.00	15.8800	9.09730
Valid N	50				

Sumber: output SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, hasil Uji Statistik Deskriptif (*Descriptive Statistics*) diatas maka penulis dapat menjelaskan bahwa jumlah seluruh sampel penelitian adalah seluruh Provinsi di Sumatera dikali lima tahun penelitian dengan total N sebesar 50. Variabel dana alokasi khusus, kompleksitas pemerintah, ukuran pemerintah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah

memiliki hasil baik karena standar deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai *mean*.

d. Hasil Uji Asumsi Klasik

a.a Uji Normalitas

Tabel 1.4 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.48212366
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.046
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		..200 ^{c,d}

Sumber: output SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 hasil uji normalitas dengan *One-Sample KolmogorovSmirnov Test* pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi asymp sebesar 0,200 lebih besar dari 0,050 sehingga, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

a.b Uji Multikolinearitas

Tabel 1.5 Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
DAK (X1)	.486	2.057
KP (X2)	.414	2.418
UK (X3)	.161	6.195

PAD (X4)	.340	2.937
BM (X5)	.860	1.162

Sumber: output SPSS 27, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.5 menunjukkan hasil Nilai tolerance untuk Dana Alokasi Khusus sebesar $0,486 > 0,10$ dan VIF untuk Dana Alokasi Khusus sebesar $2,057 < 10$, berarti variabel Dana Alokasi Khusus tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Nilai tolerance untuk Kompleksitas Pemerintah sebesar $0,414 > 0,10$ dan VIF untuk Kompleksitas Pemerintah sebesar $2,418 < 10$, berarti variabel Kompleksitas Pemerintah tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Nilai tolerance untuk Ukuran Pemerintah sebesar $0,161 > 0,10$ dan VIF untuk Ukuran Pemerintah sebesar $6,195 < 10$, berarti variabel Ukuran Pemerintah tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Nilai tolerance untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,340 > 0,10$ dan VIF untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar $2,937 < 10$, berarti variabel Pendapatan Asli Daerah tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Nilai tolerance untuk Belanja Modal sebesar $0,860 > 0,10$ dan VIF untuk Belanja Modal sebesar $1,162 < 10$, berarti variabel Belanja Modal tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

a.c Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.6 Uji Heteroskedastisitas

	t	Sig.
Constant	1.205	.235
DAK (X1)	-1.067	.292
KP (X2)	.733	.467
UK (X3)	.437	.664
PAD (X4)	-.384	.703
BM (X5)	-.794	.431

Sumber: output SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dinyatakan bahwa hasil uji heteroskedastisitas diperoleh Nilai signifikansi untuk Dana Alokasi Khusus sebesar $0,292 > 0,050$ berarti variabel Dana Alokasi Khusus tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikansi untuk Kompleksitas Pemerintah sebesar $0,467 > 0,050$ berarti variabel Kompleksitas Pemerintah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikansi untuk Ukuran Pemerintah sebesar $0,664 > 0,050$ berarti variabel Ukuran Pemerintah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 4. Nilai signifikansi untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,703 > 0,050$ berarti variabel Pendapatan Asli Daerah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 5. Nilai signifikansi untuk Belanja Modal sebesar $0,431 > 0,050$ berarti variabel Dana Alokasi Khusus tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

a.d Uji Autokorelasi

Tabel 1.7 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-W
1	.728 ^a	.530	.477	.50878	1.848

Sumber: output SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 1.7 hasil uji autokorelasi diatas, dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,848. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel durbin-watson pada signifikansi 5%. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,848 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,7708 dan lebih kecil dari 4-du yaitu $4 - 1,7708 = 2,2292$ atau dapat diringkas menjadi $dU < d < 4 - dU$ atau $1,7708 < 1,848 < 2,2292$ artinya data terhindar atau tidak terjadi autokorelasi.

e. Hasil Uji Hipotesis

a.a Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 ^a	.530	.477	.50878

Sumber: output SPSS 27, 2024

Berdasarkan tabel 1.7 diatas, koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,477 atau 47,7%. Hal ini berarti pengaruh variabel independen Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berkorelasi terhadap variabel dependen yaitu Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Provinsi Sumatera tahun 2017-2021 adalah 47,7%. Sedangkan sisanya sebesar 52,3% dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

a.b Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 1.8 Uji Statistik F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	
Regression		5	2.574	9.943	<.001 ^b
Residual		44	.259		
Total		49			

Sumber: output SPSS 27, 2024

$$F\text{-Tabel} = (n-k) = (50-5) = F\text{-Tabel } 45 = 2.42$$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($9.943 > 2.42$), dengan nilai signifikansi $< 0,001$ kurang dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan Hipotesis 6 diterima yang artinya layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

a.c Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) dan Analisis Linier Berganda

Tabel 1.9 Uji Statistik t

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Constant	-6.858	3.176		-2.159	.036
DAK (X1)	.300	.129	.344	2.323	.025
KP (X2)	.346	.153	.363	2.262	.029
UK (X3)	-1.037	.254	-1.048	-4.075	<.001

PAD (X4)	.538	.198	.481	2.718	.009
BM (X5)	.238	.057	.556	4.995	<.001

a.d Sumber: output SPSS 27, 2024

t-Tabel (n-k-1) = (50-5-1) = t-Tabel 44 = 2.01537

Berdasarkan hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Nilai ttabel diperoleh dengan cara melihat nilai t tabel pada daftar ttabel berdasarkan signifikansi sebesar 0,05 untuk menentukan t tabel dapat dicari pada signifikansi $0,05/2=0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $df = 50-5-1 = 44$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 2,01537 (lihat pada tabel statistik).

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4 + bx_5 + e$$

$$Y = -6.858 + 0,300x_1 + 0,346x_2 - 1.037x_3 + 0,538x_4 + 0,283x_5 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan apabila konstanta sebesar -6.858 artinya apabila variabel X1 sampai X5 bernilai nol (0) atau nilainya tetap (konstan), maka variabel Y memiliki nilai sebesar -6.858.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Khusus menunjukkan arah positif yaitu 0,300 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,050 yaitu 0,025 yang berarti hipotesis penelitian ini diterima. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan sesuai dengan hipotesis awal yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar alokasi Dana Alokasi Khusus dalam APBD, maka semakin meningkat jumlah temuan kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021.

Sesuai data DJPK dalam APBD setiap tahun alokasi DAK semakin meningkat. Dana Alokasi Khusus adalah mekanisme pengalokasian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau instansi tertentu untuk mendukung infrastruktur proyek-proyek atau prioritas program-program. Meskipun Dana Alokasi Khusus memiliki tujuan baik dalam mendukung pembangunan daerah, terdapat beberapa alasan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Hubungan antara teori keagenan dengan variabel DAK adalah Pemerintah (agent) telah terjadi information asymmetry dengan pihak masyarakat (*principal*) sehingga, terjadi penyelewengan atau korupsi oleh agent.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2016) dan Mustikasari (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

b. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Kompleksitas Pemerintah menunjukkan arah positif yaitu 0,346 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,050 yaitu 0,029 yang berarti hipotesis penelitian ini diterima. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan sesuai dengan hipotesis awal yaitu Kompleksitas Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kecamatan pada suatu pemerintah daerah yang mewakili variabel Kompleksitas Pemerintah, maka semakin meningkat jumlah temuan kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021.

Sesuai data BPS RI setiap tahun alokasi jumlah kecamatan wilayah di Sumatera semakin meningkat. Pemerintah provinsi yang memiliki jumlah kecamatan yang banyak akan memiliki banyak diversifikasi (cabang) dan juga semakin luas wilayahnya sehingga akan menyebabkan semakin kompleksnya pengendalian internal yang dilakukan. Adanya tingkat diferensiasi yang ada di pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah

daerah yang diikuti dengan semakin banyaknya ragam rencana kerja dan semakin banyak jumlah kegiatan yang perlu dibiayai serta semakin kompleks transaksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah yang heterogen atau berbeda-beda tergantung karakteristik tiap-tiap wilayah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara teori keagenan dengan variabel Kompleksitas Pemerintah adalah Pemerintah (*agent*) telah terjadi *information asymmetry* dengan pihak masyarakat (*principal*) sehingga, terjadi penyelewengan atau korupsi oleh *agent*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016) dan Mustikasari (2021) yang menyatakan bahwa Kompleksitas Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sedangkan Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri (2015), Saputro (2015), dan Melani (2017) yang menyatakan bahwa Kompleksitas Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

c. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Ukuran Pemerintah menunjukkan arah negatif yaitu -1,037 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,050 yaitu $< 0,001$ yang berarti hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu Ukuran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk pada Pemerintah Provinsi yang mewakili variabel Ukuran Pemerintah, maka semakin berkurang jumlah temuan kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021 begitu pula sebaliknya. Pada teori keagenan pemerintah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Penduduk merupakan salah satu stakeholder (pemangku kepentingan) bagi instansi pemerintah yang dapat memberikan tekanan dan dorongan pelaksanaan

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah karena akses dan wewenang penduduk terhadap informasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan keuangan daerah sudah terjangkau luas akibat dari perkembangan dunia sosial media yang semakin maju saat ini, Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam teori keagenan variabel Ukuran Pemerintah memiliki hubungan yang berpengaruh antara Pemerintah (agent) kepada masyarakat (*principal*).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2015) dan Alawiyah (2020) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputro (2015), Simanjuntak (2016), Rachmawati (2016), dan Mustikasari (2021) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melani (2017) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah menunjukkan arah positif yaitu 0,538 dengan nilai signifikansi lebih kurang dari 0,050 yaitu sebesar 0,009 yang berarti hipotesis penelitian ini diterima. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan hipotesis awal yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dalam APBD, maka semakin meningkat jumlah temuan kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021.

Sesuai data DJPK dalam APBD setiap tahun realisasi PAD semakin meningkat. Proses pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sangat rawan terhadap kasus korupsi

sehingga, semakin banyaknya kasus dan berita tentang korupsi pejabat pemerintah daerah Provinsi di Sumatera ke pengadilan terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakibatkan pejabat pemerintah daerah dan kurangnya patuh dalam perencanaan pengadaan serta pengawasan penggunaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2017-2021. Hubungan antara teori keagenan dengan variabel PAD adalah Pemerintah (*agent*) telah terjadi *information asymmetry* dengan pihak masyarakat (*principal*) sehingga, terjadi penyelewengan atau korupsi oleh *agent*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mustikasari (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2016), Nurwati (2015), dan Melani (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputro (2015), Putri (2015), dan Rachmawati (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

e. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Belanja Modal menunjukkan arah positif yaitu 0,283 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,050 yaitu $< 0,001$ yang berarti hipotesis penelitian ini tidak diterima. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan hipotesis awal yaitu Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2017-2021. Pemerintah (*agent*) telah terjadi *information asymmetry* dengan pihak masyarakat (*principal*) sehingga, terjadi penyelewengan atau korupsi oleh *agent*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar alokasi belanja modal dalam APBD, maka semakin meningkat jumlah temuan kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Sesuai data DJPK dalam

APBD setiap tahun alokasi Belanja Modal semakin meningkat. Proses pelaksanaan belanja modal sangat rawan terhadap kasus korupsi dan semakin meningkatnya pengungkapan korupsi pejabat daerah ke pengadilan terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat pejabat pemerintah provinsi yang mempunyai sifat konsumtif dan tidak patuh dalam perencanaan pengadaan serta pengawasan penggunaan anggaran belanja modal pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurwati (2015) dan Alawiyah (2020) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputro (2015) dan Simanjuntak (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rachmawati (2016), Melani (2017), dan Mustikasari (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah secara parsial Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang berarti dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal maka jumlah temuan kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021 juga meningkat. Secara parsial Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang berarti dengan meningkatnya Ukuran Pemerintah, maka jumlah temuan kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021 akan menurun. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan jumlah sampel dan tahun anggaran pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya.

Saran dalam penelitian ini Pemerintah khususnya Provinsi di Sumatera diharapkan dapat memelihara dan mempertahankan pengendalian internal yang sudah baik sehingga

kasus kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dapat semakin berkurang. Pemerintah daerah yang belum optimal diharapkan memperbaiki prosedur pengendalian yang ada di daerahnya. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberadaan sistem pengendalian internal pemerintah seperti jumlah aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pertumbuhan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat Dana Alokasi Umum (DAU).

Keterbatasan penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi kelemahan SPIP. Fokus dari penelitian ini membahas dan menguji mengenai berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah provinsi di antaranya adalah Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun 2017-2021. Rekomendasi Penelitian berikutnya menggunakan data primer, seperti kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi pemerintah lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai keberadaan sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan jumlah sampel dan tahun anggaran pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Ayah dan Ibu serta saudara-saudara penulis tercinta dan tersayang yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Erlangga. Jakarta.

- Abdul, Halim. (2015). *Auditing: Dasar – Dasar Audit laporan Keuangan*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Unti Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Alawiyah, TT, Sumardjo, M., & Darmastuti, D. (2020). Analisis Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8 (3), 415-424.
- Agoes, S. (2017). *Auditing*, Edisi 5, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2018). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesada (2020). Teori Keagenan. *Majalah Maya KSAP*, Edisi 1 Oktober 2020, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). <http://www.ksap.org/sap/teorikeagenan/>. Diakses pada 10 April 2023.
- IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). (2016). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mayangsari, Sekar, dan Puspa Wandanarum. (2013). *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat*. Jakarta: Media Bangsa
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Prosiding Seminar Nasional dan The 2Call for Syariah Paper*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri, Novi Kumala dan A, Mahmud. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pegendalian Intern PEMDA. *Accounting Analysis Journal* 4 (2) (2015). ISSN 2252- 6765.

- Purniasari, C. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 2013-2014). *Prosiding Seminar Nasional*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rachmawati. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147-158.
- Tuanakotta, M. T. (2018). *Forensic Accounting and Investigative Audit*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Palembang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.